

# MENUJU PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Prijono Tjiptoherijanto\*

## Abstract

*The economic crisis in Indonesia, may be interpreted as effects of a strategy of economic development which has been unsuited to the Indonesian condition and potency. The strategy, so far has been oriented to the static development, top-down, and too formal. Therefore, it should be readapted to be more populist in order to promote the interest and needs of ordinary people. The bottom-up strategy development with a basic populist concept has a primary goal to equalize the interest and welfare of ordinary people, instead of emphasizing the levels of economic development. This strategy, is an effort to optimizing the distribution of its own natural resources, thus the development will correspond with the potency and specific issues of each region.*

## Pendahuluan

Pada saat Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi pada awal dasawarsa 1990-an, tidak sedikit ekonom yang meragukan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Terlepas dari persoalan *moral hazard* dan *rent seeking behavior* yang terdapat pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia, para ekonom yang masuk dalam aliran pesimistis tersebut berpandangan bahwa Indonesia telah salah dalam

mengambil strategi pembangunan ekonomi. Hill (1996) mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 1966 sampai dengan akhir tahun 1970-an, para ekonom di Indonesia telah berhasil mengembangkan sektor industri dengan penuh kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang ada. Namun, sejak awal tahun 1990-an perkembangan industri tersebut berubah dengan lebih menekankan pada industri berteknologi tinggi. Dampaknya adalah terjadi

---

\* Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

tekanan yang sangat berlebihan pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah.\*

Apa yang dapat dipelajari dari krisis ekonomi yang berlangsung saat ini adalah bahwa Indonesia telah mengambil strategi pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki. Walaupun pada saat ini indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan ke arah perbaikan, terlalu dini untuk mengatakan telah terjadi perkembangan ekonomi secara fundamental. Lagi pula, tidak ada suatu jaminan bahwa Indonesia tidak akan kembali mengalami krisis pada masa mendatang jika faktor-faktor mendasar belum tersentuh sama sekali. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, yang dipandang sebagai pangkal permasalahan krisis ekonomi saat ini, masih belum dapat diselesaikan. Bahkan, ada kecenderungan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri ini menjadi semakin mendalam.

Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri tersebut tidak akan berkurang jika pemerintah tidak melakukan perubahan mendasar terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini. Diperlukan suatu strategi baru dalam pembangunan ekonomi dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berwawasan kependudukan.

### **Pengertian Pembangunan Berwawasan Kependudukan**

Apa yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan kependudukan? Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus yaitu, pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk

---

\* Demikian pula ekonom Amerika Serikat, Paul Krugman (1997), mengatakan bahwa krisis ekonomi di Asia, termasuk di Indonesia, sebenarnya sudah dapat diduga sebelumnya. Krisis mata uang yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hanyalah pencetus dan bukan penyebab. Penyebab sesungguhnya adalah pada kesalahan strategi pembangunan ekonomi di samping adanya masalah *moral hazard*.

dan untuk penduduk. Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.

Jargon pembangunan berwawasan kependudukan sudah lama didengar dalam bentuk atau format lain, tetapi masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sudah lama didengung-dengungkan mengenai penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan, atau jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, atau pembangunan bagi segenap rakyat. Sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh jika tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang lebih hebat lagi pada masa mendatang. Dengan demikian, indikator keberhasilan ekonomi harus diubah dari sekedar GNP atau GNP per kapita menjadi aspek kesejahteraan atau memakai terminologi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Kemiskinan Sosial (HPI), dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM),

dan sejenisnya. Memang, mempergunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkesinambungan (*sustainable*). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawanya pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur.

Mengapa selama ini Indonesia mengabaikan pembangunan berwawasan kependudukan? Hal ini tidak lain karena keinginan pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tinggi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Walaupun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional. Karena mengabaikan aspek pemerataan pembangunan

akhirnya muncul keadaan instabilitas dan kesenjangan antara golongan dan wilayah.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang kurang memperhatikan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek kependudukan selama ini.

### **Dimensi Penduduk dalam Pembangunan Nasional**

Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang

dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah *subjek* dan *objek* pembangunan. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian, pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun nonfisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.

Kedua, keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi

pembangunan nasional. Iskandar (1974) memperkirakan bahwa tanpa adanya program pengendalian pertumbuhan penduduk maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1995 akan berjumlah 237 juta jiwa. Kenyataannya, jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah sekitar 194 juta jiwa. Dengan demikian, program pengendalian pertumbuhan penduduk telah berhasil melakukan penghematan untuk berbagai pengeluaran bagi sekitar 43 juta jiwa penduduk. Pengeluaran tersebut dapat digunakan untuk program lain yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan, yang sangat diperlukan untuk investasi pada masa mendatang.

Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi.

Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang, yaitu pada tahun 2022. Demikian pula, hasil program keluarga berencana yang dikembangkan selama 30 tahun yang lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak dimasukkannya dimensi kependudukan dalam kerangka pembangunan nasional sama artinya dengan *menyengsarakan* generasi penduduk pada masa mendatang.

Perhatian pemerintah terhadap kependudukan dimulai sejak pemerintah Orde Baru memegang kendali. Konsep *pembangunan manusia seutuhnya*, yang tidak lain adalah konsep *pembangunan kependudukan*, mulai diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sejak Repelita I pada tahun 1969. Namun sedemikian jauh, walaupun pada tataran kebijakan telah secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, pemerintah tampaknya belum dapat secara optimal mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijakan

tersebut dalam berbagai program sektoral.\*

### **Mengintegrasikan Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek investasi dalam sumber daya manusia tampak sebagai suatu upaya yang sia-sia. Namun, dalam jangka panjang investasi tersebut justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Johnson dan Lee (1987) melakukan analisis dengan model regresi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada 75 negara berkembang. Dua ukuran pertumbuhan ekonomi yang digunakan yaitu GNP pada tahun 1989 dan GNP per kapita antara tahun 1980–1989. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi

dua bagian, pertumbuhan penduduk masa lalu, yaitu pertumbuhan penduduk per tahun antara 1965–1980 dan pertumbuhan penduduk saat ini, yaitu pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 1980–1989. Pembagian ini dilakukan untuk mengetahui dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pertumbuhan penduduk itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut menemukan hubungan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi antara tahun 1980–1989 berhubungan dengan rendahnya GNP per kapita pada tahun 1989 dan berhubungan dengan rendahnya pertumbuhan GNP antara tahun 1980–1989.

Demikian pula, berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan dalam jangka panjang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Rosenzweig (1998) misalnya menemukan hubungan positif sebesar 0,49

---

\* Sejah ini walaupun disebutkan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pembangunan ekonomi, dalam kenyataannya pembangunan nasional masih terlalu terfokus pada pembangunan ekonomi. Di samping itu, tampak jelas bahwa pemilihan sasaran pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan industri, dalam banyak kasus tidak memperhatikan dan memperhitungkan kondisi kependudukan yang ada.

antara *enrollment rate* sekolah dasar dari wanita usia 10–14 tahun terhadap peningkatan GNP per kapita. Demikian pula ditemukan hubungan positif sebesar 0,54 antara tingkat melek huruf dengan pertumbuhan GNP per kapita. Studi tersebut dilakukan atas data makro dari 94 negara berkembang.

Dalam hal mengintegrasikan dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting

adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Sebaliknya, orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur, sebagaimana yang terlihat selama ini di Indonesia. Demikian pula, dalam pertumbuhan ada yang dinamakan dengan *limit to growth*. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa suatu pertumbuhan ada batasnya. Jika batas itu terlampaui, yang akan terjadi adalah terjadinya pemusnahan atas hasil-hasil pembangunan tersebut. Tampaknya ini yang sedang berlangsung di Indonesia dengan terjadinya krisis ekonomi sekarang ini. Jika diingat beberapa tahun yang lalu, selalu ada peringatan bahwa perekonomian kita terlalu memanas dan lain sebagainya. Hal itu adalah kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi kita sedang memasuki apa yang disebut dengan *limit to growth*, bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dipacu lebih

tinggi lagi dengan melihat kondisi fundamental yang ada.

Ada beberapa kritik lagi yang ditujukan kepada konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yaitu 1) prakarsa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk rencana formal, 2) proses penyusunan program bersifat statis dan didominasi oleh pendapat pakar dan teknokrat, 3) teknologi yang digunakan biasanya bersifat *scientific* dan bersumber dari luar, 4) mekanisme kelembagaan bersifat *top-down*, 5) pertumbuhannya cepat, tetapi bersifat mekanistik, 6) organisatornya adalah para pakar spesialis, dan 7) orientasinya adalah bagaimana menyelesaikan program/proyek secara cepat sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, tampak bahwa peranan penduduk lokal dalam proses pembangunan sangat sedikit.

Kritik para ahli terhadap orientasi pembangunan yang mengutamakan pada pertumbuhan tersebut telah berlangsung pada paro waktu pertama tahun 1980-an. Para cendekiawan dari MIT dan *Club of Rome* pada kurun waktu tersebut secara gencar mengkritik orientasi pembangunan ekonomi tersebut. Dari berbagai kajian dan diskusi

tersebut, muncullah perspektif pembangunan yang kemudian dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek penduduk dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan berwawasan kependudukan menuntut strategi pembangunan yang bersifat *bottom-up planning*. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan *bottom-up* berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.

Pada saat ini banyak pemerintah di negara-negara berkembang mengikuti aliran



*bottom-up planning* dengan maksud lebih menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, dalam arti memanfaatkan ruang dan sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu, otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada setiap daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antardaerah akan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Beberapa kata kunci yang perlu diberikan penekanan pada pembangunan daerah adalah 1) pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi setiap daerah, dan 2) ada keseimbangan pembangunan antardaerah. Kata kunci pertama mengandung makna pada

kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pembangunan, terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan pembangunan berada pada tingkat daerah.

Kata kunci kedua mengandung makna adanya kenyataan bahwa setiap daerah memiliki potensi, baik alam, sumber daya manusia, maupun kondisi geografis yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya perbedaan potensi antardaerah ini menyebabkan peran pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan pembangunan nasional tetap diperlukan agar timbul keselarasan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan semua daerah, baik yang memiliki potensi yang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi. Dengan demikian, melalui otonomi dalam pengaturan pendapatan, sistem pajak, keamanan warga, sistem perbankan, dan berbagai pengaturan

lain yang diputuskan daerah sendiri, pembangunan setempat dijalankan.

Ada beberapa ciri kependudukan Indonesia pada masa depan yang harus dicermati dengan benar oleh para perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Beberapa ciri penduduk pada masa depan adalah sebagai berikut.

1. **Pendidikan yang meningkat.**

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, di samping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. **Peningkatan kesehatan.** Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk usia lanjut yang semakin besar akan juga menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat

memanfaatkan penduduk usia lanjut yang berpotensi agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

3. **Pergeseran usia.** Pada saat ini di Indonesia telah terjadi proses transisi umur penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan, terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, tanggung jawab pemerintah akan menjadi semakin berat.

4. **Jumlah penduduk perkotaan semakin banyak.** Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Urbanisasi ini akan menjadi masalah yang semakin rumit.

Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antardaerah, termasuk di perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di perkotaan. Mereka cukup menuju perkotaan manakala diperlukan. Ini dapat dilakukan oleh mereka dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan semakin berkurang.

5. **Jumlah rumah tangga meningkat, struktur semakin kecil.** Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumah tangga. Pada masa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, tetapi

jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin mengecilnya jumlah anak yang disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, tercipta kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain, apalagi bila otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan keperluannya.

6. **Peningkatan intensitas mobilitas.** Mobilitas penduduk yang tinggi, baik secara internal maupun internasional, menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas, serta akan bergeser kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.
7. **Tingginya pertumbuhan angkatan kerja.** Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang

lebih besar, di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi.

8. **Perubahan lapangan kerja.** Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan, dan pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah sepantasnya diamati secara seksama, terutama dalam rangka menetapkan alternatif kebijakan selanjutnya.

### Penutup

Krisis ekonomi pada saat ini telah berhasil memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan dan dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dan potensi penduduk tidak akan bersifat berkesinambungan. Pada masa krisis dan pascakrisis ekonomi, perhatian terhadap masalah kependudukan harus tetap dilakukan, terutama menyangkut upaya mengem-

bangkan pembangunan berwawasan kependudukan (*people-centered-development*). Ketidakedulian terhadap isu pembangunan berwawasan kependudukan akan menyebabkan Indonesia kembali menghadapi situasi krisis yang sama pada beberapa tahun mendatang. Hal ini perlu diwaspadai dan sedapat mungkin dihindari.

Dalam kondisi keuangan negara yang semakin terbatas dan dengan derasnya tuntutan politik dalam dan luar negeri, perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up* menjadi sangat penting. Dalam hal ini setiap daerah dituntut harus dapat memanfaatkan keuangan negara yang semakin terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan terbukti tidak berlangsung secara berkesinambungan dan tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga filosofi penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan tidak tercapai. Pembangunan tidak dirasakan sebagai milik rakyat sehingga tidak mengakar. Apa yang terjadi kemudian adalah jika terjadi sedikit gejolak (seperti yang sedang dialami pada saat ini),

gejolak tersebut menjadi sulit diatasi, dan masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam mengatasinya. Hal ini disebabkan mereka tidak pernah merasa memiliki hasil pembangunan itu.

Oleh karena itu, apa yang terjadi pada saat ini kiranya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi perencanaan dan pelaksana pembangunan

di daerah tingkat II sebagai ujung tombak pembangunan nasional pada masa mendatang. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan harus melihat pada kondisi, potensi, dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat di daerah masing-masing; tidak perlu selalu berpatokan dari apa yang terjadi di daerah lain, atau bahkan menunggu arahan pusat.

### Referensi

- Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. 1995. "Revolusi demografi dan peningkatan sumber daya manusia," dalam Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan (eds.), *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*. Jakarta: Kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, Hal. 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: PAU (Studi Ekonomi) UGM dan PT. Tiara Wacana.
- Iskandar, N. 1974. "Beberapa aspek permasalahan kependudukan di Indonesia", *special Reprint Series No.4*, Demographic Institute FE UI Jakarta, January, p.19.
- Johnson, D.G. and Lee, Ronald. 1987. *Population Growth and Economic Development Issues and Evidences*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, USA.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. 1994. *Indonesia Country Report Population and Development*. Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. 1997. *Draft Repelita VII Bidang Kependudukan*. Jakarta.

- Krugman, Paul. 1994. "The myth of Asia miracle", *Fortune*, November.
- Krugman, Paul. 1997. "What happened to Asia miracle", *Fortune*, November.
- Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN. 1998. "Strategi kebijaksanaan kependudukan," *ceramah di SESKO ABRI*, Bandung, 6 Nopember.
- Rosenzweig, Mark R. 1998, "Human capital, population growth, and economic development", *Journal of Policy Modelling*, Special Issue on Population Growth and Economic Development.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Economic crisis and recovery: the Indonesia's case," *The EWCA Regional Conference in the Philippines on Asia and the Pacific in the Millenium: Challenges, Opportunities & Responses*, Manila, Phillippines, 28-29 January.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.